

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Latif, 2014. Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Kencana. Philipus M. Hadjon, 2011. Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Adrian Sutedi, 2010, Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 1986. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta: PT. Gramedia. A.Djoko Sumaryanto, 2009. Pembalikan Beban Pembuktian, Jakarta: Prestasi Pustaka
- H. Abdul Latif, 2014, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta
- Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Cetakan Ke-4, Mirra Buana Media, Yogyakarta
- Jawde Hafidz A, Korupsi dalam Perspektif Hukum Addministrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta
- Purwosusilo, 2014, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa, Kencana, Jakarta
- Ridwan H.R, 2010. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal:

- Hadjon, Philipus M, Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Th.2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.4 No.1, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Trisaksti Jakarta. 2015.
- Juliani, Henny, "Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara", *Adminitrative Law and Governance Journal*, Vol. 2 No. 4, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.
- Pratisthita, Ni Made Saraswati, I Gusti Ngurah Wairocana, "Penyalahgunaan Wewenang pada Kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi”, *Kertha Negara*, Vol. 7 No. 8, Universitas Udayana, Bali, 2019.

Satriyawan, Muhammad Erry. Asmara, Galang. Purnomo, Eko Crisdianto, “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Jurnal*

Binawakya, Vol. 15, No. 8, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2021.

Simanjuntak, Enrico Parulian, “Penguujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA-RI, Jakarta Pusat, 2018.

Syamsudin, Ahmad Rustan, “Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa”, *Jambura Law Review*. Vol. 2, No. 2, Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara, 2020.

Utami, Ni Made Suwindayan, I Gusti Ayu Putri Kartika, “Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegawai Negara Sipil”, *Kertha Negara*, Vol. 7 No. 8, Universitas Udayana, Bali, 2019.

Admin, Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (*Abuse Of Power*). <https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>, Diakses pada tanggal 24 April 2022, 2021.

Sari, Maya, 7 Penyebab Terjadinya Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan, <https://gurupkn.com/penyebab-terjadinya-tindakan-penyalahgunaan-kewenangan>, diakses pada tanggal 24 April 2022, 2015.

Tesis:

Teguh Afriyadi, Tesis dari Universitas Indonesia Jakarta yang membahas mengenai “Analisis Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*Electronic Procurement*) Di Instansi Pemerintah.

Rakhmat Tharir, Tesis dari Universitas Hasanuddin Makassar yang membahas mengenai “Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Kabupaten Mamuju.

Muhammad Aksan, Tesis Dari Universitas Bosowa 45 Makassar yang membahas mengenai “Analisis Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap PNS Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.

Internet:

Peran Penting Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Bagian Dari Pengelolaan Keuangan Negara, URL: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-peran-penting-pengadaan-barangjasa-sebagai-bagian-dari-pengelolaan-keuangan-negara/>, diakses pada tanggal 16 September 2019.

Aspek Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, URL: <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan%20perbendaharaan/13406-aspek-hukum-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>, diakses pada tanggal 15 September 2019

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Kota Makassar, Kode Pos 90231
Website : birobarjas.sulselprov.go.id, email : birobarjassulsel@gmail.com

KETERANGAN

Nomor : 000-9.2/7411/B(ropes)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eddy Setiadi Irawan, S.T., M.T.
NIP : 197707172006041004
Jabatan : Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini adalah :

Nama : Muh. Aufa Aqzani
Judul Tesis : Penerapan Larangan Penyalahgunaan Wewenang dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Benar telah melaksanakan penelitian terkait dengan judul tesis tersebut di atas di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian keterangan ini diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 20 April 2024

an. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa



Eddy Setiadi Irawan, S.T., M.T.
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV.a)
NIP. 197707172006041004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Andi Pangerang Pettarani No.100 Telp. (0411) - 453137 Makassar, Kode Pos 90222

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 094/2356/IA.3/ltprov

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUZLIA QURNIATI SYAM S.E.Ak
NIP : 19790810 200112 2 006
Pangkat, Gol Ruang : Pembina Tk I
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

Nama : MUH AUFA AQZANI
No. Pokok : B012222015
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS HASANUDDIN
Judul Penelitian : "PENERAPAN LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA"

Benar Bahwa Yang Bersangkutan Telah Melaksanakan Penelitian Di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 5 Juli 2024

Pih. **INSPEKTUR,**



NUZLIA QURNIATI SYAM, S.E.Ak., M.Adm.KP

Pangkat : Pembina Tk.1

NIP : 19820125 200804 2 003